



Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kota Kediri Tahun 2024)

Lilis Saputri^{1*}, Hestin Sri Widiawati², Sigit Puji Winarko³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

Email: lilissaputri090@gmail.com ^{1*}, hestin.sw@gmail.com ², sigitpuji@unpkediri.ac.id ³

*Penulis Korespondensi: lilissaputri090@gmail.com

Abstract Motor Vehicle Tax is one of the main sources of regional revenue, essential for supporting development and public services. However, taxpayer compliance has tended to decline despite the continuous increase in the number of vehicles. This study aims to analyze the effect of service quality, income level, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Kediri City. A quantitative approach with a causal research design was used. The sample consisted of 100 respondents, selected using simple random sampling with Slovin's formula at a 10% margin of error. Data analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS version 23. The results show that service quality does not significantly affect taxpayer compliance, while income level and tax sanctions have significant effects. Simultaneously, all three variables significantly influence compliance. These findings highlight the importance of income and strict sanctions in improving tax compliance.

Keywords: Income Level; Motorized Vehicles; Tax Sanctions; Tax Service Quality; Taxpayer Compliance.

Abstrak Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang penting untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas. Sampel sebanyak 100 responden ditentukan melalui teknik *simple random sampling* menggunakan rumus *slovin* dengan *margin of error* 10%. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya faktor pendapatan dan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan.

Kata Kunci: Kendaraan Bermotor; Kepatuhan Wajib Pajak; Kualitas Pelayanan Pajak; Sanksi Perpajakan; Tingkat Pendapatan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara maupun daerah. Salah satu pajak yang berperan penting adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menjadi kontribusi besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Octavianingtyas, 2020). Namun, seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, tingkat penerimaan pajak tidak selalu menunjukkan tren yang sebanding. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah (Demes *et al.*, 2024). Di Kota Kediri, data menunjukkan tren penurunan tingkat kepatuhan dari tahun ke tahun. Tahun 2023 tercatat hanya 87,59% dari jumlah objek pajak yang membayar kewajibannya, lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Berbagai faktor dapat

mempengaruhi kepatuhan tersebut, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, hingga sanksi perpajakan.

Kualitas pelayanan perpajakan yang optimal, seperti informasi yang jelas, prosedur mudah, serta respons petugas yang sigap dapat mendorong wajib pajak lebih patuh (Angreni & Permata, 2023). Namun, hasil survei kepuasan terhadap pelayanan Samsat Kota Kediri menunjukkan peningkatan yang sangat kecil dari tahun 2022 ke 2023, yakni hanya sebesar 0,16% (LKJIP Bapenda Jatim, 2022), artinya ini menjadi indikasi perlunya perbaikan pelayanan yang lebih nyata dan menyeluruh. Tingkat pendapatan juga menjadi faktor penting. Wajib pajak dengan penghasilan memadai cenderung lebih patuh karena memiliki kemampuan ekonomi untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Kukuh Bhagaskara *et al.*, 2023). Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu dibanding membayar pajak kendaraan mereka (Nurfebrianti *et al.*, 2024).

Selain itu, sanksi perpajakan yang tegas dan diterapkan tanpa pengecualian sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar aturan. Namun, di Kota Kediri, penerapan sanksi dinilai belum optimal, sehingga kurang memberikan tekanan psikologis maupun administratif bagi wajib pajak yang menunda atau tidak membayar pajaknya (Sri Dwima, 2023). Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan dapat secara parsial maupun simultan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri tahun 2024, sebagai dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat dan efektif dalam peningkatan kepatuhan pajak daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) merupakan sikap patuh dan kesadaran hukum dalam menjalankan kewajiban membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan (Ramadhanni *et al.*, 2023).

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain (Angreni & Permata, 2023):

- 1) Wajib pajak melakukan pelaporan pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.
- 2) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Wajib pajak mengisi pajak formulir perpajakan secara lengkap, akurat, dan mudah dipahami.
- 4) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor.

Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku. Penelitian ini mengacu dari hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Putri *et al.*, (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan serta sanksi pajak pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Teori Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan bentuk pelayanan administrasi yang komprehensif, di berikan dengan konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku, demi mewujudkan pelayanan yang optimal bagi wajib pajak (Putri *et al.*, 2022).

Terdapat beberapa Indikator yang dijadikan dasar untuk menilai kualitas pelayanan pajak pada penelitian ini yaitu (Angreni & Permata, 2023) :

- 1) Aparat pajak menyampaikan informasi yang transparan, lengkap, serta mudah dipahami oleh wajib pajak.
- 2) Proses pelayanan dilakukan secara mudah, cepat, dan transparan.
- 3) Petugas pajak memberikan pelayanan dengan teliti untuk meminimalisir kesalahan.
- 4) Petugas pajak mampu merespon berbagai kebutuhan atau kepentingan dari wajib pajak.
- 5) Keluhan dari wajib pajak ditindaklanjuti dengan sigap dan tepat waktu oleh petugas pajak.

Indikator tersebut digunakan untuk menilai seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dalam memenuhi hak dan kebutuhan wajib pajak secara profesional, cepat, dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Izza, (2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, ketika dianalisis secara simultan, ketiga variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Teori Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan wajib pajak dapat diartikan sebagai keseluruhan penghasilan yang diterima wajib pajak dari berbagai sumber, seperti gaji, kegiatan usaha, maupun hasil investasi (Ristiana *et al.*, 2022).

Tingkat pendapatan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain (Kukuh Bhagaskara *et al.*, 2023) :

- 1) Selalu patuh membayar pajak meski memiliki penghasilan rendah.
- 2) Besarnya pajak tidak menjadi hambatan untuk membayar.
- 3) Mampu membayar pajak yang sesuai ketentuan.
- 4) Pendapatan yang diterima cukup untuk kebutuhan pokok dan kewajiban pajak.

Indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak mampu menunjang kepatuhan dalam membayar pajak, tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Penelitian terdahulu oleh Fita, Khusnatul, (2022) menjelaskan bahwa secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, serta sanksi perpajakan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

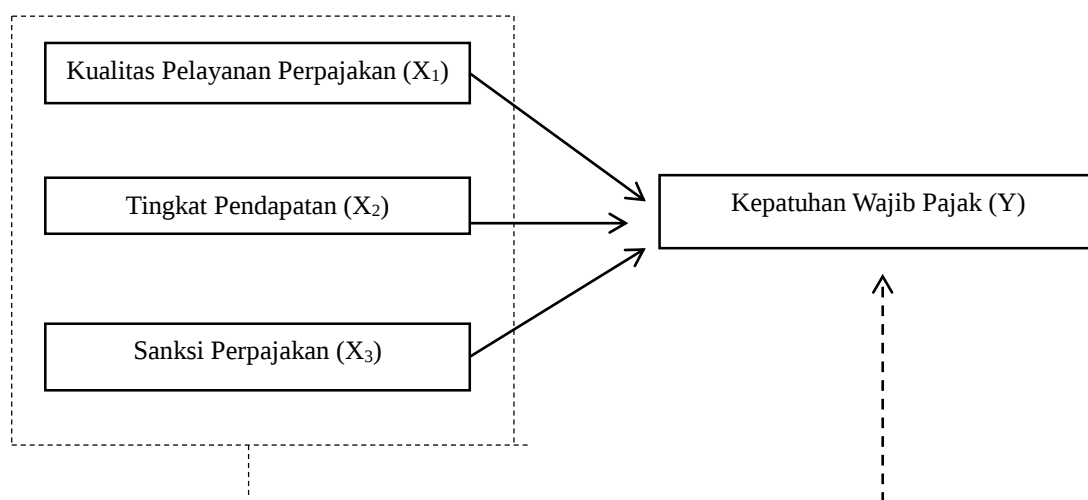
Teori Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku (Ayuni, 2023).

Sanksi perpajakan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain (Sudiarto, 2020):

- 1) Sanksi pidana yang diterapkan tergolong berat untuk pelanggar aturan pajak.
- 2) Sanksi administratif dinilai ringan bagi pelanggar aturan pajak.
- 3) Pengenaan sanksi yang tegas dan berat merupakan sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 4) Pemberian sanksi pajak dilakukan tanpa pengecualian atau toleransi terhadap pelanggaran.
- 5) Pengenaan sanksi pelanggaran pajak bisa dinegosiasikan

Indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pemberlakuan sanksi mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan, serta mendorong mereka untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketegasan, konsistensi, dan keadilan dalam penerapan sanksi dinilai penting agar wajib pajak tidak mengabaikan tanggung jawabnya dan menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Sitorus *et al.*, (2023) ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



Gambar 1. Kerangka Berfikir.

Keterangan :

—————> : Menunjukkan pengaruh secara parsial

-----> : Menunjukkan pengaruh secara simultan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri sebanyak 168.982 orang. Menurut Sugiyono (2020), sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden yang diperoleh menggunakan rumus *slovin* dengan tingkat kesalahan 10%. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*, karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner *skala likert*, yang disebarakan melalui *google form* kepada responden wajib pajak kendaraan bermotor. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh langsung dari responden, dan data sekunder. Instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item kuesioner memiliki nilai *r*-hitung > *r*-tabel (0,3610), sehingga dinyatakan valid, sementara uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,6 untuk semua variabel. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 23, dengan teknik analisis berupa regresi linier berganda. Untuk memastikan keabsahan model, digunakan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial, digunakan uji *t*, sedangkan untuk menguji pengaruh simultan, digunakan uji *F*. Selain itu,

digunakan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kediri dengan fokus pada wajib pajak kendaraan bermotor. Data dikumpulkan selama periode Februari hingga Juni 2025.

Analisis Statistik Deskriptif

Melalui analisis ini, dapat diketahui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut agar memudahkan dalam memahami distribusi data responden dalam penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif.

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Pelayanan Pajak	100	31,00	50,00	43,6100	4,08717
Tingkat Pendapatan	100	25,00	40,00	35,3000	3,42156
Sanksi Perpajakan	100	31,00	50,00	43,7900	3,89845
Kepatuhan Wajib Pajak	100	26,00	40,00	34,8400	3,16777
Valid N (listwise)	100				

Sumber :Data Output SPSS, 2025.

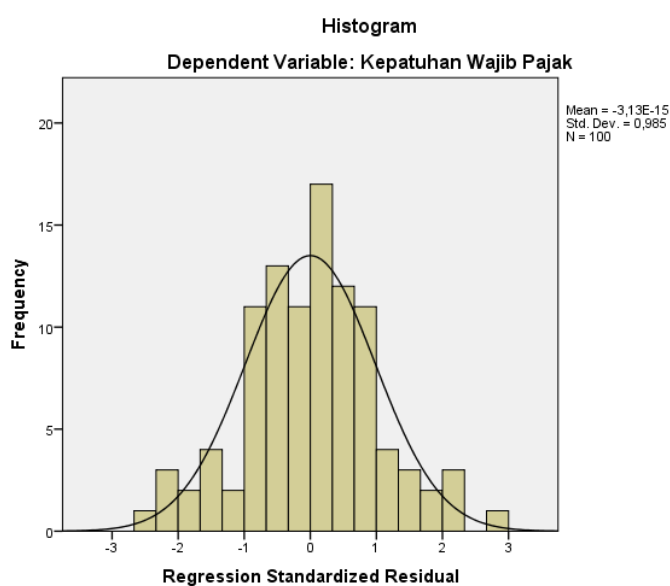
Dari tabel hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui bahwa jumlah sampel (N) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh informasi mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang diteliti. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 26,00 dan maksimum sebesar 40,00, dengan rata-rata sebesar 34,8400 serta standar deviasi sebesar 3,16777. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tergolong tinggi dan cukup merata di antara para responden, mengingat rata-rata yang mendekati nilai maksimum dan standar deviasi yang relatif kecil. Selanjutnya, variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai minimum sebesar 31,00 dan maksimum 50,00, dengan rata-rata 43,6100 dan standar deviasi sebesar 4,08717. Nilai ini mengindikasikan bahwa secara umum responden menilai pelayanan pajak sudah cukup baik, walaupun terdapat perbedaan tanggapan yang cukup terlihat antarresponden. Sementara itu, variabel tingkat pendapatan menunjukkan nilai minimum sebesar 25,00 dan maksimum sebesar 40,00, dengan nilai rata-rata 35,3000 dan standar deviasi sebesar 3,42156. Hal ini mencerminkan bahwa mayoritas responden memiliki pendapatan pada tingkat menengah ke atas dengan tingkat variasi yang cukup moderat. Terakhir, variabel sanksi

perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 31,00 dan maksimum sebesar 50,00, dengan rata-rata 43,7900 serta standar deviasi sebesar 3,89845. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai sanksi perpajakan cukup efektif, dengan persebaran jawaban yang relatif seragam.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dari model regresi terdistribusi secara normal. Distribusi normal residual merupakan syarat utama dalam regresi klasik untuk menjamin validitas model.



Gambar 2. Analisis Grafik Hist.

Sumber :Data Output SPSS, 2025.

Berdasarkan gambar diatas, hasil analisis grafik histogram menunjukkan bahwa kurva membentuk pola menyerupai lonceng (*bell-shaped*) dan terbagi simetris ke kiri dan ke kanan, yang menandakan distribusi data residual cenderung normal. Titik puncak kurva berada tepat di sekitar titik nol (0), yang merupakan nilai tengah dari residual standar. Hal ini memperkuat bahwa sebagian besar data residual terpusat di sekitar nilai rata-rata, dan jumlah data di sisi kiri maupun kanan cenderung seimbang. Dengan pola distribusi seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan secara sah dan valid.

Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan atau korelasi antar variabel independen (bebas). Sebuah data dapat dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas jika memiliki nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai

Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10 (Ghozali, 2019). Berikut ini adalah data hasil pengujian multikolinieritasnya:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas.

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
	Std.						
	B	Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,479	3,610		2,626	,010		
Kualitas Pelayanan Pajak	,085	,077	,110	1,100	,274	,661	1,514
Tingkat Pendapatan	,266	,104	,287	2,550	,012	,520	1,922
Sanksi Perpajakan	,280	,077	,345	3,653	,000	,740	1,352

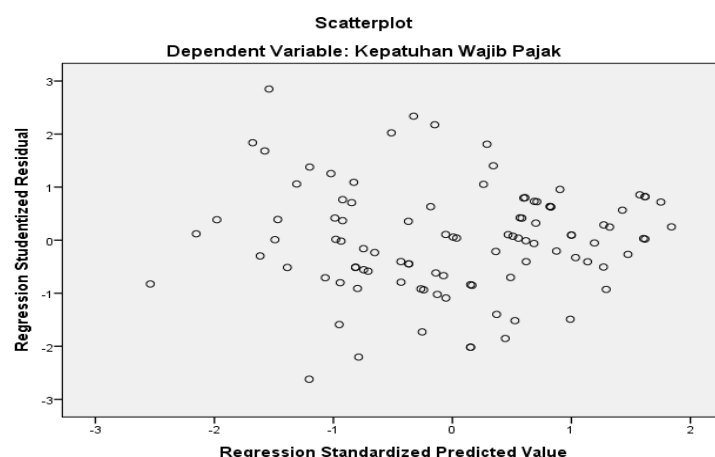
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber :Data Output SPSS, 2025.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas diketahui bahwa variabel Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,661 dengan nilai *VIF* 1,514, Tingkat Pendapatan menunjukkan nilai *tolerance* 0,520 dan *VIF* 1,922, sedangkan Sanksi Perpajakan memperoleh nilai *tolerance* 0,740 dan *VIF* 1,352. Karena seluruh nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* masih berada di bawah angka 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas di antara variabel independen dalam penelitian ini. Artinya, masing-masing variabel bebas tidak memiliki hubungan linear yang tinggi satu sama lain, sehingga layak untuk digunakan dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan *varians* residual antara satu data pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2019). Data yang baik untuk digunakan dalam penelitian adalah data yang menunjukkan kesamaan *varians* dari nilai residual. Dalam pengujian ini, keputusan diambil dengan memperhatikan grafik scatterplot. Apabila titik-titik pada grafik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu di sekitar sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Adapun berikut ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan:

**Gambar 3.** Hasil Uji Scatterplot.

Sumber :Data Output SPSS, 2025.

Dari tampilan grafik scatterplot di atas, menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara acak dan merata di sekitar garis 0 pada sumbu Y . Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2019).Berikut merupakan data hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1			
(Constant)	9,479	3,610	
Kualitas Pelayanan Pajak	,085	,077	,110
Tingkat Pendapatan	,266	,104	,287
Sanksi Perpajakan	,280	,077	,345

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber :Data Output SPSS, 2025.

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 9.479 + 0,085X_1 + 0,266X_2 + 0,280X_3 + e$$

Berdasarkan data diatas diketahui persamaan regresi pada penelitian ini mempunyai makna sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 9.479 menunjukkan bahwa apabila variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X_1), Tingkat Pendapatan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) dianggap tidak

mengalami perubahan atau bernilai nol, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) tetap berada pada nilai 9.479.

- 2) Koefisien regresi pada variabel Kualitas Pelayanan Pajak (X_1) sebesar 0,085 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas pelayanan pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,085, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 3) Koefisien regresi pada variabel Tingkat Pendapatan (X_2) sebesar 0,266 berarti bahwa apabila terjadi peningkatan pendapatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,266, dengan catatan variabel lain dianggap tetap.
- 4) Koefisien regresi pada variabel Sanksi Perpajakan (X_3) sebesar 0,280 menunjukkan bahwa setiap peningkatan efektivitas sanksi perpajakan sebesar 1 satuan akan mendorong kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,280, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah

Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mendapatkan bukti untuk mendukung atau menolak hipotesis.

Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh setiap variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2019). Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Berikut ini hasil uji parsial (uji t) :

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (t).

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	9,479	3,610		2,626	,010
	Kualitas Pelayanan Pajak	,085	,077	,110	1,100	,274
	Tingkat Pendapatan	,266	,104	,287	2,550	,012
	Sanksi Perpajakan	,280	,077	,345	3,653	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber :Data Output SPSS, 2025.

- 1) Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi parsial diketahui bahwa thitung sebesar 1,100 > ttabel 1,985 selain itu, nilai

signifikansi $(0,274) < (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu tingkat pendapatan. Berdasarkan hasil analisis regresi parsial diketahui bahwa thitung sebesar $2,550 > t_{tabel} 1,985$ selain itu, nilai signifikansi sebesar $(0,012) < (0,05)$ serta koefisien regresi sebesar 0,232 yang bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil analisis regresi parsial diketahui bahwa thitung sebesar $3,653 > t_{tabel} 2,001$ selain itu, nilai signifikansi sebesar $(0,000) < (0,05)$ serta koefisien regresi sebesar 0,280 yang bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan yang berasal dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2019). Keputusan dalam uji F didasarkan pada nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Tabel di bawah ini menyajikan uji f:

Tabel 5. Hasil Uji Silmutan (F).

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	364,748	3	121,583	18,565	,000 ^b
	Residual	628,692	96	6,549		
	Total	993,440	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pendapatan

Sumber : Data Output SPSS, 2025.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai signifikan dari uji F adalah 0,00. Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan secara silmutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, hanya variabel tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar kantor bersama samsat Kota Kediri meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama dalam aspek transparansi informasi, kecepatan, dan sikap petugas, agar dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain dalam model penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, mengingat masih terdapat 65,3% faktor lain di luar model yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR REFERENSI

- Angreni, L., & Permata, A. (2023). Bermotor di Kota Pontianak. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Infrastruktur*, 8(1), 7–14. <https://doi.org/10.35384/jamie.v1i1.421>
- Ayuni, H. A. M., & M. E. P. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.31933/jimt.v5i1>
- Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 74–88. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i1.449>
- Data output SPSS. (2025). *Hasil olahan data statistik penelitian: Pengaruh kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. Data tidak dipublikasikan.
- Demes, Listyowati, & Werdiningsih, S. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Malang Selatan. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 1, 85–94.
- Dwima, S. (2023). *Pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor* (Skripsi).
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi terbaru). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Izza, A. N. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPENDA Jawa Timur. (2022). *LKjIP BAPENDA Jawa Timur Tahun 2022*. BAPENDA Provinsi Jawa Timur.

- Nurfebrianti, K., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, dan penerapan e-SAMSAT terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1547–1559. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2432>
- Octavianingtyas. (2020). *Pengaruh sosialisasi pajak, pelayanan pajak, biaya kepatuhan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Wonosobo* (Skripsi). Universitas terkait.
- Putri, D. A., Idrawahyuni, I., & Khalid, A. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan dan sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v3i1.2564>
- Ramadhanni, D. K., Fauziyah, & Srikalimah. (2023). Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan sistem SAMSAT drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(3), 359–366. <https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jakbs/article/view/184>
- Ristiana, F., Khusnatul, & Nursayidatul. (2022). Pengaruh program pemutihan, SAMSAT keliling, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Behavioral Accounting Journal*, 5(2), 111–131. <https://doi.org/10.33005/baj.v5i2.204>
- Sitorus, L. H. J., Waryanto, R. B. D., & Fauziah. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Journal of Sustainability Business Research*, 4(1), 72–84. <https://doi.org/10.60090/kar.v4i1.907>
- Sudiarto, E. (2020). Kesadaran wajib pajak, sanksi wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Malang. *Inspirasi*, 17(2), 286–293. <https://jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/1575>